

**ANTARA SEJARAH SOSIAL
DAN SEJARAH PENGUASA:
Kritik terhadap Historiografi Pendidikan Islam di Indonesia**

Nadlir

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya
Email: nadlir_uban@yahoo.com.

Abstrak: Penulisan sejarah (historiografi) pendidikan Islam (SPI) di tanah air sampai saat ini masih memiliki problem mendasar, yakni dominasi pendekatan sejarah kekuasaan. Pendekatan ini, selain mengabsahkan praktek-praktek kekuasaan, juga berkecenderungan kuat melupakan aspek-aspek terpenting dalam kajian SPI yang selama ini nyaris tak tersentuh. Penegasian terhadap historiografi pendidikan Islam sebelum era Abbasiyah, dan pengakuan sepenuhnya peran penguasa terhadap perkembangan kelembagaan pendidikan Islam di Andalusia menjadi petunjuk, bahwa pendekatan sejarah politik atau sejarah penguasa masih dominan dalam kajian SPI di tanah air.

Kata Kunci: Sejarah, historiografi, sejarah sosial, pendidikan Islam.

Abstract: The historiography of Islamic education (HIE) in Indonesia still faces fundamental problems, namely the dominance of the historical power approach. This approach legitimizes the practices of using power and has strong tendency to forget the most untouched aspects in the study of SPI. The neglation of the historiography of Islamic education before the Abbasid era and the recognition of the role of the authorities fully on the development of Islamic education institutions in Andalusia be a hint that the political history approach or the history of the ruler is still dominantly used in the study of HIE in Indonesia.

Keywords: history, historiography, social history, Islamic education.

Pendahuluan

Penulisan sejarah (historiografi) pendidikan Islam (SPI) di tanah air sampai saat ini masih memiliki problem serius yang belum terpecahkan. Nyaris tidak terbantahkan, khazanah SPI dari waktu ke waktu tidak mengalami perkembangan berarti, bahkan terkesan mundur ke belakang.¹ Hanya sedikit ditemukan, karya-karya yang memberikan perhatian terhadap dinamika historis pendidikan Islam di tanah air. Menariknya, karya-karya tersebut lebih tepat disebut kumpulan artikel ilmiah, bunga rampai atau setidaknya-tidaknya hasil "cipta karya gropyokan" ketimbang sebagai karya akademis sesungguhnya.² Fenomena ini, tentu saja, berbeda cukup jauh, jika

¹Bidang kajian sejarah pendidikan Islam, sepanjang hasil penelusuran yang dilakukan, masih terfokus dan menggunakan khazanah intelektual yang diwariskan oleh Mahmud Yunus, Zuhairini dan kawan-kawan yang muncul pada awal tahun 1990-an. Padahal, sejarah pendidikan Islam di tanah air memiliki perkembangan begitu dinamis. Konsekuensinya, aspek-aspek terpenting dalam dinamika baru pendidikan Islam pada era orde baru, bukan saja terabaikan tetapi bahkan terlupakan. Salah satunya, perkembangan yang begitu dinamis di sekitar kelembagaan pendidikan Salafisme sejak tahun 1980-an yang tidak pernah mendapatkan sentuhan berarti di kalangan peminat SPI. Sebaliknya, dinamika itu justru ditangkal, dicermati, ditelusuri dan dikaji secara mendalam oleh "orang luar". Noorheidi, misalnya, dapat disebut sebagai salah satu *Islamic scholars* dari disiplin non kependidikan yang memiliki perhatian serius terhadap kelembagaan pendidikan Islam dilingkaran Salafisme pada era orde baru tersebut. Noorheidi Hasan, *Laskar Jihad: Islam, Militancy and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia* (PhD Dissertation: Utrecht University, 2005); Noorheidi Hasan, "Faith And Politics: The Rise of The Laskar Jihad In The Era of Transition In Indonesia", *Indonesia*, Vol. 73 (April 2002), hlm. 146-149; Noorheidi Hasan, "The Salafi Madrasas of Indonesia", dalam *The Madrasa in Asia, Political Activism and Transnational Linkages*, ed. Farish A. Noor, Yoginder Sikand and Martin van Bruinessen (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008); Noorheidi Hassan, "Salafi Madrasas and Islamic Radicalism in Post-New Order Indonesia", dalam *Islamic Studies and Islamic Education in Contemporary South Asia*, ed. Kamaruzzaman Bustaman-Ahmad (Kuala Lumpur: Yayasan Ilmuwan, 2011).

²Keringnya karya memadai tentang sejarah pendidikan Islam, terutama sejarah kelembagaan pendidikan Islam di tanah air berimplikasi serius bagi "orang-orang dalam" (*insiders*) atau para sarjana didikan sekolah-sekolah Islam. Untuk melakukan studi mendalam tentang aspek tertentu dalam kelembagaan formal pendidikan Islam, mereka akhirnya harus menggunakan data "orang-orang luar" (*outsiders*) atau karya-karya hasil kreasi sarjana didikan sekolah umum. Abd. Rachman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional, Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Pra-proklamasi ke*

diperbandingkan dengan studi atau karya-karya tentang sejarah kelembagaan pendidikan umum di tanah air.³

Konsentrasi bidang kajian SPI juga masih belum mendapatkan kesepakatan dimata para pengkajinya. Sebagian mengkonsentrasikan bidang kajian SPI pada historisitas aspek-aspek kelembagaan kependidikan Islam dalam bayang-bayang sepenuhnya era abad pertengahan. Lebih dari itu, pengkajian bukan menelisis historisitas dinamika kelembagaan pendidikan Islam di tanah air, melainkan di semenanjung Arabia pada abad pertengahan.⁴ Pada saat yang sama, sebagian para peminat studi SPI memilih fokus pada historisitas kelembagaan pendidikan Islam di tanah air. Dalam perspektif arus yang kedua ini, pengkajian SPI berupaya menelusuri penggalan-penggalan historisitas kelembagaan pendidikan Islam, sejak era kerajaan Islam, kolonial Belanda, pendudukan Jepang, orde lama, dan orde baru.⁵ Arus ketiga studi SPI di Indonesia mencoba menggabungkan dua bidang kajian sebelumnya, yaitu kajian kelembagaan pendidikan Islam pada era abad pertengahan di semenanjung Arabia, dan di tanah air.⁶

Reformasi (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005). Buku ini pada awalnya merupakan disertasi Assegaf yang dipertahankan di IAIN (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

³Karya-karya mendalam tentang sejarah pendidikan umum, jauh hari sudah bermunculan, yang bukan sekedar berisikan artikel ilmiah atau bunga rampai semata. Yang menarik, sebagian dari karya-karya tersebut justru diproduksi oleh Departemen Pendidikan, sebuah lembaga Negara yang memiliki kewenangan dan bertanggung jawab penuh menyelenggarakan pendidikan umum di tanah air. Depdikbud, *Pendidikan di Indonesia, 1900-1974* (Jakarta: Depdikbud-Balai Pustaka, 1975); Depdikbud, *Pendidikan di Indonesia Jaman Penjajahan* (Jakarta: Depdikbud, 1993); H.A.R Tilaar, *Lima Puluh Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional, 1945-1995* (Jakarta: PT Gramedia, 1995); S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia* (Bandung: Penerbit Jemmars, 1983). Salah satu buku, tepatnya karangan Tilaar mencapai ketebalan lebih dari 1.000 (seribu) halaman.

⁴Lihat artikel-artikel yang ditulis oleh Usman, Rahmawaty Rahim, Lailial Muhtifah, Momon Mujiburrahman, Deden Makbullah, Durrotul Mufidah, Agus Sholeh, dan lain-lain, dalam Suwito dan Fauzan, ed. *Sejarah Sosial Pendidikan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2005).

⁵ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999).

⁶ Zuhairini et.al., *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).

Problem ketiga yang juga sangat mendasar adalah, pendekatan yang digunakan dalam studi SPI. Sejarah penguasa (*official history*) atau sejarah politik (*political history*) masih menjadi pendekatan dominan dalam studi SPI di tanah air. Penting dicatat bahwa, sejarah penguasa bukan hanya sekedar membahas ulang peristiwa masa lain, melainkan lebih dari itu, kehadirannya sekaligus merepresentasikan "pantulan ideologis". Struktur sejarah penguasa, dengan demikian, bukanlah merepresentasikan diskursus atau narasi yang netral, namun sekaligus juga membentuk setumpuk ide dan "sebuah cara untuk menciptakan dan menanggapi realitas tanpa batas sesuai dengan fungsinya sebagai pemelihara landasan struktur kekuasaan".⁷

Tulisan ini tidak hendak membahas keseluruhan problem bidang kajian SPI di atas. Sebaliknya, problem ketiga nampaknya menjadi lebih penting mendapatkan perhatian. Pelanggaran sejarah penguasa sebagai pendekatan dalam studi SPI, bukan hanya berakibat pada pengabsahan terhadap praktek-praktek kekuasaan dan ideologi Negara. Selain itu, pendekatan sejarah penguasa memiliki kecenderungan kuat melupakan aspek-aspek terpenting dalam kajian SPI yang selama ini nyaris tak tersentuh dan bahkan mustahil terpikirkan.

Sejarah Penguasa dan Sejarah Sosial

Tradisi historiografi hingga pada akhir abad ke-19 M didominasi oleh pendekatan sejarah politik (*political history*) atau sejarah penguasa (*official history*). Sebagaimana namanya, sejarah penguasa cenderung bersifat reduksionis karena menegasikan atau setidaknya, mengabaikan aspek-aspek historis yang penting diungkapkan. Sejarah

⁷ Taufik Abdullah, "Masalah Kontemporer Ilmu Sejarah dan Historiografi", *Historia: Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. II, No. 10 (Desember 2011), hlm. 10. Dalam kasus di Indonesia, misalnya, narasi sejarah penguasa yang diproduksi oleh Orde Baru sarat dengan pantulan ideologis, dan lebih spesifik lagi "praktek-praktek kuasa" untuk menjustifikasi dan melegitimasi struktur kekuasaan orde Suharto tersebut. Konsekuensinya, narasi-narasi sejarah mendistorsi aspek-aspek historis yang dipahami merugikan dan mendelegitimasi kekuasaan orde baru. Michael Wood, *Official History in Modern Indonesia, New Order Perceptions and Counterinterview* (Leiden: Brill Academic Publisher, 2005).

penguasa juga memiliki kecenderungan kuat pada upaya melegitimasi atau mempertahankan struktur kekuasaan atau kompromis terhadap *status quo*.

Sejarah penguasa yang juga disebut sebagai sejarah lama (*the old history*) atau sejarah tradisional dalam pengertian sederhana menunjuk pada sejarah orang-orang terkenal.⁸ Dalam pemaknaan lebih luas, sejarah penguasa dapat dimengerti sebagai “sejarah politik, berpusat pada politik dan memiliki kecenderungan sangat elitis”.⁹ Atau dapat pula diartikan sebagai “sejarah tentang *mainstream*, atau mereka yang dipandang *mainstream*.”¹⁰

Perhatian sejarah penguasa yang hanya pada orang-orang terkenal, para raja, para penguasa, dan kelompok-kelompok *mainstreams* mengantarkan historiografi yang dihasilkan memiliki kelemahan-kelemahan mendasar. Kelemahan-kelemahan ini mendapatkan kritik dan serangan dari internal para sejarawan sendiri.

Pertama, tradisi penulisan sejarah penguasa, sejarah politik atau sejarah lama memiliki kecenderungan kuat bersifat naratif dan ensiklopedik.¹¹ Sifat dasar sejarah penguasa ini muncul sebagai konsekuensi dari keengganan dan penolakan untuk mempertautkan disiplin ilmu sejarah dengan ilmu pengetahuan lain. Eksklusivitas yang melekat dalam sejarah penguasa ini memicu penilaian kritis dari para pengkritiknya. Francois Simiand melalui artikel kontroversialnya dengan nada sinis menuding sejarawan tradisional lekat dengan tiga berhala, yaitu berhala politik (*idol of politics*), berhala individu (*idol of*

⁸Peter Burke, *History and Social Theory* (Ithaca: Cornell University Press, 1992), hlm. 14. Pengertian singkat tentang sejarah penguasa ini juga dinyatakan MacCall yang mengatakan bahwa, sejarah politik adalah sejarah para raja dan lembaga-lembaga peradilanannya (*the kings and their courts*). Daniel MacCall, “Introduction” dalam *Writing African History*, ed. John Edward Philips (Suffolk: University of Rochester Press, 2005), hlm. 13.

⁹Azyumardi Azra, “Konsep Kesejarahan Kuntowijoyo, Pentingnya Imajinasi, Emosi, Instuisi, dan Estetika Bahasa yang Khas dalam Penulisan Sejarah”, *Ibda'*, Vol. 3, No. 2 (Juli-Desember 2005), hlm. 4.

¹⁰Azyumardi Azra, *Historiografi Islam Kontemporer, Wacana, Aktualitas, dan Aktor Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 163; Azyumardi Azra, “Hijaz; Antara Sejarah Politik dan Sejarah Sosial” Badri Yatim, *Sejarah Sosial Keagamaan Tanah Suci, Hijaz (Makkah dan Madinah), 1800-1925* (Jakarta: Logos: Wacana Ilmu, 1999), hlm. ix-x.

¹¹ Azra, “Konsep”, hlm. 4.

individual), dan berhala kronologi (*idol of chronology*). Simiand juga menyebut mereka sebagai intelektual yang gemar menulis sejarah yang berpusat pada kejadian (*event-centered history*) dan mencocok-cocokkan antara satu fakta dengan fakta lainnya.¹²

Kedua, sejarah penguasa mengabaikan fakta bahwa "kehidupan dan kebudayaan manusia tidaklah melalui politik" semata, tetapi sebaliknya, "politik hanya merupakan salah satu aspek dari perjalanan sejarah anak manusia".¹³ Ketika sejarah sekedar didekati dengan perpektif politik dan kekuasaan semata, maka sama halnya telah melakukan distorsi dan reduksi terhadap sejarah secara keseluruhan. Aspek-aspek kebudayaan lainnya, seperti kesejarahan pendidikan, perekonomian, keberagaman, dan seterusnya menjadi terabaikan.¹⁴ Dalam konteks studi tentang sejarah Islam, misalnya, pendekatan sejarah politik memiliki kemungkinan historiografi Islam yang penuh dengan intrik, konflik, pertumpahan darah, dan pertikaian kekuasaan diantara para penguasa muslim.¹⁵

Ketiga, sejarah penguasa atau sejarah politik mengabaikan begitu saja faktor-faktor lain yang berpengaruh dalam kesejarahan kebudayaan manusia. Kritik ini, salah satunya, dinyatakan oleh Azra:

Perjalanan sejarah manusia secara objektif memang tidak hanya ditentukan oleh politik dan para penguasa. Politik tentu saja merupakan satu faktor penting, tetapi bukan satu-satunya. Bahkan sebaliknya, seperti argumen madzhab Annels dari Perancis, justru faktor-faktor geografis, iklim atau lingkungan alam lainnya yang menentukan. Faktor-faktor seperti ini pada gilirannya menciptakan struktur-struktur yang koheren dan bertahan dalam waktu yang amat lama (*longe duree*). Struktur-struktur inilah yang menentukan corak kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Struktur-struktur itu, menurut madzhab Annels, bersifat eksternal bagi pemikiran, tetapi

¹²Burke, *History*, hlm. 11.

¹³Azra, *Historiografi*, hlm. 163.

¹⁴Djoko Suryo, "Sejarah Sosial Intelektual Islam: Sebuah Pengantar", dalam Nor Huda, *Islam Nusantara, Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hlm. 17.

¹⁵Azra, *Historiografi*, hlm. 163.

kemudian sangat menentukan kondisi-kondisi tertentu bagi mentalitas (*mentalite*) dan kehidupan fisik manusia.¹⁶

Keempat, sejarah penguasa atau sejarah politik lekat dengan upaya melanggengkan kekuasaan. Historiografi disusun sedemikian rupa yang diharapkan dapat membentuk pengetahuan sejarah (*historical knowledge*) dan kesadaran sejarah (*historical conciousness*) yang berorientasi pada legitimasi dan pemapanan terhadap kekuasaan. Negara melakukan kontrol sepenuhnya terhadap produksi maupun reproduksi teks-teks kesejarahan. Kontrol, terutama melalui pembakuan aturan-aturan bersifat mengikat dan harus dipenuhi oleh para sejarawan ketika mengkreasi historiografi. Penulisan sejarah, dengan demikian, berbicara "*about the past as such*", tetapi juga mengandaikan *political purposes* penguasa.¹⁷

Munculnya Karl Lumphrecht (1856-1915 M), salah seorang historian Jerman pada akhir abad ke-19 M menandai munculnya era baru dalam tradisi historiografi. Ia memunculkan teori "*collective history*" untuk menulis salah satu karya terkenalnya "*History of Germany*" yang dipublikasikan secara luas dalam upaya mengkritik lembaga sejarah Jerman. Saat itu, lembaga tersebut terlalu menekankan hanya pada aspek sejarah politik dan orang-orang terkenal (*emphasis on political history and great man*). Penggunaan teori *collective history* dimaksudkan oleh Lumphrecht untuk menunjukkan

¹⁶Azra, *Historiografi*, hlm. 163; Suryo, "Sejarah", hlm. 17.

¹⁷Menariknya, historiografi yang berorientasi pada kemapanan kekuasaan ini juga diberlakukan dalam penulisan teks-teks sejarah yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan. Kasus historiografi pada era Orde Baru adalah contoh yang paling kentara. Untuk memapankan kekuasaannya, Negara melakukan kontrol sepenuhnya yang salah satunya terhadap peredaran teks-teks tentang sejarah politik atau sejarah penguasa di tanah air. Untuk mengefektifkan kontrol tersebut, Negara membentuk tim beranggotakan sejarawan yang bertugas menulis buku-buku pelajaran sejarah. Tim tergabung dalam "*the Committe for the Compilation of an Indonesian National History Standard Book Based on Pancasila*" dan dibawah kontrol Menteri Pendidikan Nasional. Dari mereka, lahirlah buku-buku sejarah standar perspektif penguasa Orde Baru dan absah disebarluaskan di seluruh lembaga-lembaga pendidikan. Wood, *Official*, hlm. 30-32. Kontrol Orde Baru terhadap teks-teks sejarah bukan hanya dalam konteks substansi atau materi kesejarahan, melainkan juga penggunaan struktur bahasa teks-teks tersebut. Ariel Heryanto et.al., *Bahasa dan Kekuasaan, Politik di Panggung Orde Baru* (Bandung: Mizan Press, 1996).

bahwa, penulisan atas karyanya diatas diadaptasi dari berbagai disiplin ilmu (*draw on other disciplines for its concepts*).¹⁸

Sayangnya, kritik Lumprecht tidak mendapat tempat dikalangan sejarawan Jerman. Sebaliknya, ide-ide historiografi kritisnya justru mendapatkan simpati di Amerika dan Perancis. Salah seorang sejarawan Amerika, Frederick Jackson pada tahun 1890-an mulai menggunakan pendekatan sejarah sosial untuk menuliskan karya-karyanya. Selain Jackson, terdapat pula nama lain yang juga mendukung sepenuhnya penggunaan pendekatan sejarah sosial, seperti Turner dan James Harvey Robinson. Bahkan, nama yang terakhir disebut-sebut sebagai juru kampanye yang tangguh (*eloquent preacher*) bagi penyebaran pendekatan sejarah sosial, tradisi sejarah baru yang "*concerned with all human activities and draw on ideas from anthropology, economic, psychology and sociology*", tradisi penulisan sejarah yang mempertimbangkan keseluruhan kegiatan manusia dan mengambil ide-ide dari antropologi, ekonomi, psikologi dan ekonomi.¹⁹

Sementara di Perancis, penerimaan terhadap sejarah sosial menemukan momentumnya pada sekitar tahun 1920-an. March Bloch (1878-1956) dan Lucien Febvre (1886-1944) merupakan dua guru besar dari Universitas Stasbourg yang mempelopori penggunaan pendekatan sejarah sosial di Perancis.²⁰ Keduanya menerbitkan jurnal

¹⁸Burke, *History*, hlm. 14. Setidaknya, Lumprecht telah mengembangkan penulisan sejarah dengan "melampaui konflik metodologi", "*Methodenstreit*" atau "*conflict over methodology*", antara yang digunakan dalam tradisi historiografi dengan disiplin ilmu lainnya, terutama ilmu-ilmu sosial. Paling tidak, ia secara terbuka mulai mengadaptasi teori-teori yang berasal dari "*the social sciences, psychology, art history, and the study of culture*", tidak hanya ilmu sosial, melainkan juga psikologi, sejarah seni, dan studi kebudayaan. Geoff Eley, "*The Generations of Social History*", dalam *Encyclopedia of European Social History*, ed. Peter N. Stearns et. al. (New York: The Gale Group, 2001), hlm. 3.

¹⁹Burke, *History*, hlm. 15.

²⁰Seperti ditegaskan Burke, penggunaan sejarah sosial oleh kedua guru besar tersebut, didasarkan atas obsesi keduanya untuk melakukan reformasi atau bahkan revolusi terhadap tradisi penulisan sejarah di Perancis paska perang dunia pertama (*the World War I*), sehingga historiografi di Negara tersebut lebih manusiawi. Peter Burke, "*The Annales Paradigm*", dalam *Encyclopedia of European Social History*, ed. Peter N. Stearns et. al. (New York: The Gale Group, 2001), hlm. 41; Peter Burke, *The French Historical Revolution, The Annales School, 1929-89* (Cambridge: Polity Press, 1990), hlm. 21-24.

berkala *Annales d'histoire economique et sociale* untuk mengikis dominasi sejarah politik di Perancis. Bagi keduanya, sejarah politik harus diganti dengan “ *A wider and more human history, a history which would include all human activities and which would be less concerned with the narrative of events than with the analysis of structure.*”²¹

Melalui sentuhan sejarawan dari Jerman, Perancis dan Amerika tersebut, sejarah sosial berkembang pesat dalam tradisi historiografi di Eropa. Sejak sekitar tahun 1900-an, muncul generasi baru sejarawan yang menggunakan pendekatan sejarah sosial dalam penelitian maupun penulisan karya-karya historiografisnya. Bahkan, sebagian dari mereka berasal dari Belanda, seperti Jacobus van Leur, CLM Panders, Alfons van der Kraan, dan seterusnya. Generasi baru sejarawan Belanda, dengan pendekatan sejarah sosial, memiliki pandangan kritis terhadap para pendahulunya yang terjebak pada bias kolonialisme dalam studi mereka tentang Indonesia.²²

Di Indonesia, transmisi pendekatan sejarah sosial mulai mendapatkan tempat sejak munculnya karya-karya Sartono Kartodirdjo. Di mata sejarawan Indonesia, sejarah sosial semakin mendapat tempat yang ditandai oleh munculnya perspektif baru dalam karya-karya tentang historiografi Indonesia. Beberapa dapat disebut, misalnya, karya Taufik Abdullah tentang perubahan sosial di Minangkabau, Ongkhokam mengenai sejarah runtuhnya feodalisme di Indonesia pada abad ke-19, Teuku Ibrahim Alfian tentang keterlibatan masyarakat dalam perang Aceh, Kuntowijoyo yang mengurai

²¹Burke, *History*, hlm. 15-16. “suatu sejarah yang luas dan lebih berkemanusiaan, suatu sejarah yang menyertakan keseluruhan aktifitas manusia dan meninggalkan perhatiannya pada penguraian peristiwa-peristiwa dengan mengedepankan analisa struktur”.

²² Salah satunya adalah Van Leur yang pada tahun 1939 melakukan kritik tajam terhadap terhadap karya F.W. Stapel tentang Indonesia. Bagi Leur, studi Stapel bias kolonialisme dan sebaliknya, telah menistakan dan meniadakan hak bersejarah bagi anak-anak Negeri. Abdullah, “Masalah”, hlm. 10. Pendekatan sejarah sosial juga digunakan Leur pada saat meneliti tentang perdagangan Indonesia dan Masyarakatnya pada tahun 1934. Demikian halnya Panders yang meneliti tentang sejarah kemiskinan di Bojonegoro, dan Kran yang mengkaji penindasan terhadap rakyat Lombok dengan perspektif sejarah sosial. Suryo, “Sejarah”, hlm. 15-16.

perubahan masyarakat petani di Madura, perubahan sosial masyarakat di Semarang oleh Joko Suryo, dan seterusnya.²³

Di kalangan *Indonesian Islamic scholars*, Azyumardi Azra dapat dipandang sebagai pelopor transmisi pendekatan sejarah sosial sebagai bagian dari studi Islam. Salah satu karya utamanya "*Jaringan Ulama Timur Tengah*", yang pada awalnya merupakan laporan hasil riset untuk kepentingan disertasinya di Columbia University, New York, Amerika Serikat (1986) ditulis dengan menggunakan pendekatan sejarah sosial.²⁴ Selain Azra, terdapat nama Badri Yatim²⁵ dan Aqib Suminto²⁶ yang juga menggunakan pendekatan sosial sebagai pendekatan dalam studi doktoral keduanya. Dan sampai saat ini, ditemukan banyak historiografi Islam Indonesia yang berbasis pada sejarah sosial dari hasil kreasi sarjana didikan lembaga-lembaga pendidikan Islam di tanah air.

Dari paparan sebelumnya, setidaknya telah didapat gambaran awal tentang sejarah sosial. Bahwa, kehadiran sejarah sosial pada dasarnya mengemuka sebagai jawaban atas paradigma sejarah politik atau sejarah penguasa yang distortif dalam mendialogkan masa lalu kebudayaan umat manusia dengan era kekinian. Namun, sejarah sosial dalam perkembangannya juga memiliki pengertian sangat beragam. Azra menyebutkan bahwa, keragaman sebagai konsekuensi dari istilah "sosial" yang memiliki konotasi beragam, sehingga melahirkan pemahaman "sejarawan dan penulis sejarah secara berbeda-beda pula".²⁷

Sungguh pun demikian, mengacu pada hasil penelusuran Azra, sejarah sosial setidaknya dapat didefinisikan dan dipahami dalam tiga narasi besar.²⁸ *Pertama*, sejarah sosial didefinisikan sebagai "sejarah tentang kehidupan sehari-hari, yang sering telah menjadi hal-

²³Suryo, "Sejarah", hlm. 16.

²⁴Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII, Akar Pembaharuan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004).

²⁵Badri Yatim, *Sejarah Sosial Keagamaan Tanah Suci, Hijaz (Makkah dan Madinah), 1800-1925* (Jakarta: Logos: Wacana Ilmu, 1999). Buku ini pada awalnya merupakan hasil disertasinya di IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

²⁶Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1996). Karya ini pun pada awalnya merupakan hasil disertasi di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

²⁷Azra, *Historiografi*, hlm. 163-164.

²⁸Ibid., hlm. 164.

hal yang *taken for granted*". Arti penting kehidupan sehari-hari didasarkan pada satu prinsip bahwa, "kehidupan sehari-hari, jika terus berulang-ulang akan menciptakan struktur yang mempengaruhi mentalitas dan kebudayaan material manusia". Karena perhatiannya yang mendalam terhadap kehidupan sehari-hari secara menyeluruh dan struktur sosial, maka sejarah sosial disebut pula sebagai sejarah menyeluruh (*total history*) atau sejarah struktur (*structural history*). Kedua, sejarah sosial dipahami dalam konteks gerakan sosial (*social movement*) atau gerakan perlawanan (*protest movement*). Sejarah sosial, dengan demikian, merupakan "sejarah gerakan-gerakan sosial yang mewujudkan diri dalam bentuk gerakan-gerakan protes, yang selama ini dipandang sebagai berada di luar *mainstream*". Ketiga, sejarah sosial yang lebih sempit pengertiannya dengan membatasi pengertian sosial terkait dengan beberapa aspek kehidupan yang paling penting dalam sejarah kebudayaan manusia, termasuk didalamnya aspek politik "tanpa harus pergi ke rincian lebih jauh tentang sejarah *daily life*".

Hasil penelusuran Azra juga menyebutkan, sejarah sosial terus mengalami pemutakhiran, baik definisi maupun ruang lingkungannya. Paling tidak, sejarah sosial berkembang luas dan memasuki 7 (tujuh) bidang-bidang kajian; 1) demografi dan kekerabatan (*kinship*); 2) masyarakat perkotaan atau urban; 3) kelompok-kelompok dan kelas sosial; 4) sejarah mentalitas dan sejarah kolektif; 5) transformasi masyarakat, termasuk yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh industrialisasi dan modernisasi; 6) gerakan sosial atau fenomena protes sosial; dan 7) sejarah pendidikan, tradisi keilmuan, pengetahuan dan kekuasaan (*knowledge and power*), atau wacana intelektual. Termasuk dalam bagian terakhir ini adalah, sejarah pemikiran (*history of thought*), sejarah intelektual, dan sejarah ide (*history of ideas*).²⁹

²⁹Suryo, "Sejarah", hlm. 19. Suryo dengan mengutip Roland Stomberg menambahkan, sejarah ide, sejarah pemikiran atau sejarah intelektual menunjuk pada "*study the role of ideas in historical events and process*". Lebih lanjut, ia mengatakan "biasanya, sejarah intelektual mencoba mencari kembali dan memahami penyebaran karya-karya pemimpin kebudayaan--ide-ide mereka pada masyarakat tertentu". Selain itu, "sejarah intelektual juga mencoba memahami hubungan antara ide tertentu pada satu pihak dan dipihak lain kecenderungan (*drive*) dan kepentingan (*interest*), serta faktor-

Selain yang diurai sebelumnya, terdapat satu ciri khas yang melekat dan menjadi pembeda antara sejarah sosial dengan sejarah politik atau sejarah penguasa. Jika sejarah politik menghindari penggunaan teori-teori disiplin ilmu lainnya, maka sebaliknya, sejarah sosial sangat adaptif dan akomodatif, terutama dalam penerimaannya terhadap teori-teori sosiologi dan antropologi. Bagi sejawaran sosial, sejarah sosial dengan ilmu-ilmu sosial, terutama sosiologi dan antropologi memiliki relasi timbal balik dan saling menguntungkan. Bukan hanya relasi timbal balik, sejarah sosial disebut-sebut juga memiliki hutang budi kepada ilmu-ilmu sosial, karena sejarah sosial “lahir berkat ilmu-ilmu sosial”, dan demikian pula, penjelasan kesejarahannya didasarkan atas ilmu-ilmu sosial.³⁰ Oleh karena itu, mendalami sejarah sosial “tidak dapat dilepaskan dari belajar ilmu-ilmu sosial”.³¹

faktor non intelektual pada umumnya, dan sosiologi perseorangan dan masyarakat”. Suryo, “Sejarah”, hlm. 19.

³⁰ Kuntowijoyo mencatat, teori-teori sosial memberikan kontribusi terhadap sejarah sosial, terutama dalam konteks merumuskan konsep, teori, permasalahan, dan pendekatan. *Pertama*, penggunaan ilmu sosial untuk menemukan konsep kunci dalam sejarah sosial, misalnya, konsep *local politics* dalam disertasi Anhar Gonggong tentang konflik antar golongan di Sulawesi Selatan. Demikian pula, konsep *rural elite* dipergunakan oleh Suhartono dalam disertasinya tentang perubahan sosial di Surakarta. *Kedua*, penggunaan teori sosial untuk menyusun teori-teori sejarah sosial, misalnya teori *collective behavior* digunakan untuk mengkaji sejarah sosial perang sabil di Aceh oleh Ibrahim Alfian. *Ketiga*, permasalahan-permasalahan dalam ilmu sosial yang diadaptasi untuk menentukan topic-topik dalam sejarah sosial, seperti masalah yang terkait dengan mobilitas sosial, migrasi, gerakan petani, kebangkitan kelas menengah, dan seterusnya. *Keempat*, ilmu sosial berperan membantu menemukan pendekatan studi dalam sejarah sosial, baik sejarah yang mengurai tentang gejala sejarah dalam periode cukup panjang atau sejarah yang lebih terfokus pada aspek-aspek tertentu, seperti ekonomi, kelas sosial, politik, dan sebagainya. Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Bentang, 2005), hlm. 115-116.

³¹ Terdapat banyak teori sosial yang diadaptasi oleh sejarah sosial. Burke mencatat, setidaknya beberapa teori sosial utama dipergunakan dalam sejarah sosial, termasuk diantaranya; 1) peran sosial (*social role*); 2) seks dan gender; 3) keluarga dan kekerabatan (*family and kinship*); 4) kelompok dan identitas (*community and identity*); 5) kelas sosial; 6) status; 7) pergerakan sosial (*social mobility*); 8) konsumsi utama dan modal simbolik (*conspicuous consumption and symbolic capital*); 9) saling menguntungkan (*reciprocity*); 10) patronase dan korupsi; 11) kekuasaan (*power*); 12) pusat dan pinggiran (*center and periphery*); 13) penundukan dan perlawanan (*hegemony and resistance*); 15) gerakan sosial (*social movement*); 16) mentalitas dan ideologi; 17)

Kritik Sejarah Pendidikan Islam di Tanah Air

Di tanah air, sulit untuk tidak mengatakan bahwa, kajian-kajian tentang sejarah pendidikan Islam lebih tepat disebut sebagai pengkajian terhadap sejarah politik pendidikan Islam. Bidang kajian disiplin keilmuan ini lebih banyak didominasi oleh diskursus kelembagaan pendidikan Islam bentukan penguasa. Atau setidaknya, bidang kajian yang digeluti banyak berkaitan dengan sejarah kegiatan ulama atau intelektual yang menjadi bagian dari kekuasaan, atau paling tidak, memiliki kedekatan dengan penguasa. Sejarah pendidikan gerakan *mainstream* tak urung juga cukup mendominasi bidang kajian sejarah pendidikan Islam di tanah air.

Bidang kajian sejarah pendidikan Islam, baik di Semenanjung Arabia maupun di tanah air bukan saja berkaitan dengan lembaga formal, melainkan non formal dan informal.³² Selain itu, bidang kajian juga mengurai kesejarahan kelembagaan pendidikan Islam yang bukan saja yang dibentuk dan ditumbuhkembangkan oleh penguasa, tetapi sebaliknya, hasil inisiatif masyarakat mestinya juga menjadi perhatian. Singkatnya, bidang kajian sejarah pendidikan Islam

komunikasi dan penerimaan (*communication and reception*); 16) oralitas dan tekstualitas; dan 17) mitos. Burke, Burke, *History*, hlm. 44-103. Berbeda dengan Burke MacRaidl dan Taylor lebih spesifik dalam penggunaan teori sosial, terutama teori tentang "social structure", "human agency", dan "social ritual". Donald M. MacRaidl dan Avram Taylor, *Social Theory and Social History* (New York: Palgrave MacMillan, 2004).

³² Untuk mendapatkan gambaran teoritik yang jelas tentang katagori pendidikan formal, non formal dan informal, dapat dirujuk: Gabriel Carron and Roy A. Carr-Hill, *Non-Formal Education: Information and Planning Issues* (Paris: UNESCO-International Institute of Educational Planning, 1991); UNESCO, *NFE-MIS Handbook: Developing A Sub-National Non-Formal Educational Management Information System* (Paris: UNESCO: International Institute of Educational Planning, 2005); UNESCO, *International Standard Classification of Education* (Paris: UNESCO: International Institute of Educational Planning, 1997); David R. Evans, *The Planning of Non-Formal Education* (Paris: UNESCO: International Institute of Educational Planning, 1981); Wim Hoppers, *Non Formal Education and Basic Education Reform: A Conceptual Review* (Paris: UNESCO: International Institute of Educational Planning, 2006). Sedangkan dalam konteks kelembagaan pendidikan Islam di tanah air saat ini, katagorisasi pendidikan kedalam tiga bagian diatas, dapat dirujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor (No.) 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2007 tentang *Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan*, dan PP No. 17 Tahun 2010 tentang *Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*.

berkisar pada sejarah pendidikan penguasa dan sekaligus, sejarah pendidikan masyarakat.

Dalam konteks sejarah pendidikan di semenanjung Arabia, historiografi kelembagaan pendidikan Islam lebih mendapat tempat, dan pada saat yang sama, cenderung mengabaikan proses-proses pembelajaran melalui lembaga pendidikan hasil inisiatif masyarakat. Diskursus tentang sejarah kelembagaan pendidikan Islam era Dinasti Saljuq (447-656 H/1055-1258 M), maka secara dominan menggambarkan dinamika pendidikan Islam di Nizhamiyah.³³ Sebaliknya, lembaga-lembaga lain pada era yang sama nyaris tak tersentuh. Tidak hanya itu, Nizhamiyah diakui sebagai institusi pendidikan Islam "pertama" yang menggunakan model madrasah dengan sistem pembelajaran modern.³⁴

Lekatnya nama Imam Ghazali (w. 505 H/1111 M) dengan Nizhamiyah bisa saja menjadi salah faktor pendorong (*driving force*) popularitas institusi pendidikan Islam tersebut. Namun, faktor keterlibatan Ghazali di Nizhamiyah bukanlah menjadi satu-satunya

³³Nizhamiyah merupakan institusi pendidikan Islam yang didirikan dan ditumbuh kembangkan oleh Nizham al-Mulk (465-485 H) yang diresmikan pada tahun 459 H/1067 M. Nizam al-Mulk sendiri dikenal sebagai salah satu menteri (*wazîr*) terkenal pada era kekuasaan Bani Saljuq, tepatnya pada masa pemerintahan Sultan Alb Arsalan dan Malik Syah. Ia mendirikan satu lembaga pendidikan di berbagai kota yang berada di wilayah kekuasaan Saljuq, seperti Bagdad, Nisapur, Balk, Heart, Asfahan, Bashrah, Marwu, Annal, dan Mausil. Tidak hanya itu, di kota-kota yang termasuk wilayah Irak dan Khurasan, Nizam al-Mulk juga mendirikan lembaga pendidikan. Seluruh lembaga pendidikan yang dibangunnya memiliki nama saya, yaitu Nizhamiyah. Yosep Aspat Alamsyah, "Pendidikan Islam pada Era Dinasti Saljuq (447-656 H/1055-1258 M), Kajian tentang Lembaga dan Kurikulum Pendidikan Islam", dalam *Sejarah Sosial*, hlm. 150; Habib Husnial Pardi, "Eksistensi Madrasah Awal (Pada Abad IX-X M)", dalam ed. Suwito dan Fauzan, *Sejarah Sosial*, hlm. 216; Suyadi, "Peserta Didik Pada Zaman Keemasan Islam", dalam *Ibid.*, hlm. 248.

³⁴Paling tidak, meskipun ada yang berpendapat bahwa, Nizhamiyah bukanlah institusi pendidikan yang pertama kali menggunakan model madrasah, namun keberadaannya paling populer bukan hanya di kalangan masyarakat Islam, melainkan juga non-Islam. Dengan mengutip Mehdi Nakosteen, Husnial menegaskan bahwa popularitas Nizhamiyah sebagai akibat dari statusnya sebagai institusi pendidikan bermodel madrasah pertama, yang "secara khusus oleh Negara dan Sunni". Selain itu, Nizhamiyah juga "memiliki spirit ilmu pengetahuan yang tinggi, baik untuk tujuan politik maupun agama, yaitu membentuk opini publik Islam sunni ortodoks terhadap Islam Syi'ah". Husnial Pardi, "Eksistensi", hlm. 216.

pendongkrak popularitas. Yang justru mesti dipertimbangkan adalah, popularitas mengemuka sebagai konsekuensi dari dukungan penuh penguasa dalam menjaga sustainabilitas institusi Nizhamiyah dan proses pembelajaran didalamnya. Bahkan dapat dikatakan, Nizhamiyah dapat disebut sebagai institusi bentukan penguasa.

Keterlibatan sepenuhnya penguasa Saljuq terhadap Nizhamiyah, salah satunya, diakui Husnial. Dengan mengadaptasi Syalaby, Maksun dan Muhtar, ia mengatakan:

Pendirian Nizhamiyah merupakan pembatas untuk membedakannya dengan era pendidikan Islam sebelumnya. Era baru yang dimaksud adalah adanya ketentuan kongkrit berkaitan dengan komponen-komponen pendidikan dan keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan madrasah. Selanjutnya dikatakan bahwa Nizhamiyah merupakan lembaga resmi dan pemerintah terlibat dalam menetapkan tujuan-tujuannya, kurikulumnya, memilih guru, dan memberikan dana kepada madrasah. Dan ia merupakan lembaga resmi yang menghasilkan pegawai dan karyawan-karyawan pemerintah.³⁵

Kritik lain yang tak kalah penting adalah, teks-teks sejarah sosial tentang dinamika kelembagaan pendidikan Islam di tanah air sengaja "mendinginkan" atau "melenyapkan" tiga babakan yang cukup signifikan, yaitu: periode Muhammad, empat Khulafâ' al-Râsyidîn, dan Mu'âwiyah. Nyaris tidak ada yang menolak, bidang kajian sejarah pendidikan Islam di semenanjung Arabia, mestinya bukan hanya berisikan kesejarahan disekitar kelembagaan pendidikan Islam era Abbasiyah hingga modernisasi sistem pendidikan di Mesir. Namun, bidang kajian juga memperbincangkan secara serius dinamika kesejarahan pendidikan sejak Era Muhammad (571-632 M), empat Khulafâ' al-Râsyidîn (632-661), dan Umayyah di Damaskus (661-750), baru kemudian era Abbasiyah, dan seterusnya.³⁶

³⁵Husnial Pardi, "Eksistensi", hlm. 217.

³⁶Di tanah air, periodeisasi sejarah pendidikan Islam mengikuti urutan kejadian atau kronologi yang berlaku dalam sejarah politik dan kekuasaan dalam Islam. Penggunaan kronologi dalam sejarah politik dan penguasa didasarkan atas pertimbangan bahwa, "pada hakekatnya sejarah pendidikan Islam tidak terlepas dari sejarah Islam", dan oleh karena itu, "periodisasi sejarah pendidikan Islam dapat dikatakan berada dalam periode sejarah Islam itu sendiri". Rahmawaty Rahim,

Permasalahannya sekarang, kenapa tiga babakan sejarah pendidikan Islam menjadi bidang kajian yang nyaris tidak tersentuh? Bisa jadi, kelangkaan terhadap sumber atau rujukan menjadi salah satu penyebabnya, sehingga menyulitkan peminat studi sejarah sosial pendidikan untuk mengkajinya.³⁷ Namun juga sulit menafikan bahwa, "pendiaman" juga diakibatkan oleh sejarah *mainstream* atau mereka yang dipandang *mainstream*. Pemihakan terhadap sejarah *mainstream* ini dikenal luas dalam sejarah politik atau sejarah penguasa. Jadi, "pendiaman" terhadap sejarah pendidikan Islam era Muhammad, Khulafâ' al-Râsyidîn, dan Umayyah bukan semata-mata akibat kelangkaan sumber atau rujukan, melainkan karena keterjebakan para peminatnya terhadap sejarah penguasa.

Terlalu banyak dan mungkin tidak terhitung lagi, historiografi Islam yang mengklaim bahwa periode Abasiyah merupakan era keemasan Islam (*golden age*). Era keemasan Abbasiyah ditandai,

"Metode, Sistem, dan Materi Pendidikan Dasar (*Kuttâb*) bagi Anak-Anak pada Masa Awal Daulah Abbasiyah (132 H/750 M-243 H/847 M)", dalam *Sejarah Sosial*, hlm. 20; Zuhairini, et al., *Sejarah*, hlm. 7; Hasbullah, *Sejarah*, hlm. 15. Menariknya, ketiganya menggunakan satu sumber yang sama, yakni periodeisasi sejarah politik perspektif Harun Nasution. Bandingkan dengan Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 11.

³⁷Sama halnya, ketika dihadapkan pada munculnya pendapat berbeda mengenai status Nizhamiyah sebagai institusi pendidikan Islam pertama yang menggunakan model madrasah. Karena ternyata ditemukan pula bukti-bukti historis adanya madrasah yang telah berkembang jauh sebelum Nizhamiyah didirikan. Dengan alasan tidak ada sumber-sumber yang memadai, dua pendapat berbeda dibiarkan begitu saja tanpa ada kritik memadai. Seorang penulis mengatakan, "menurut hemat penulis, adanya beberapa pendapat tersebut tidak perlu menjadi perdebatan dalam tulisan ini. Mengingat jangkauan penulis dalam mengumpulkan referensi, informasi tentang madrasah pertama berdiri sangatlah terbatas. Asumsi penulis bahwa bisa dimungkinkan akan muncul pendapat/temuan baru nanti atau yang akan datang dari peneliti atau pemerhati sejarah". Husnial Pardi, "Eksistensi", hlm. 215-216. Tentu saja, pernyataan tersebut berbeda dengan apa yang ditegaskan Rahman (1997). Bagi Rahman, "memang betul bahwa sistem madrasah pertama kali muncul di Nishapur, tetapi tersiarnya madrasah dengan luas adalah semenjak didirikannya madrasah Nizhamiyah". Selain itu, "dari sudut organesasi dan lembaga, madrasah Nizhamiyah adalah madrasah pertama yang berbentuk lembaga yang secara sistematis dapat membawa kepada puncak perkembangan pendidikan Islam". Asep Kurniawan, "Kebangkitan Madrasah, Telaah Historis Madrasah Nizhamiyah", *Jurnal Al-Tarbiyah*, Edisi XX, Vol. 1 (Juni 2007), hlm. 18.

terutama, oleh apresiasi para penguasanya terhadap ilmu pengetahuan. Fenomena historis ini yang mendorong peminat studi sejarah sosial pendidikan Islam di tanah air untuk mengkonsentrasikan bidang kajiannya pada era Abbasiyah. Tidak mengejutkan, jika ditemukan teks sejarah pendidikan di tanah air yang memberikan apresiasi begitu mendalam terhadap dinamika kesejarahan pendidikan era Abbasiyah.³⁸

Bidang kajian sejarah pendidikan Islam di Spanyol juga perlu mendapatkan tanggapan kritis. Para penguasa muslim di negara tersebut digambarkan memiliki pengaruh besar dalam perkembangan sejarah pendidikan Islam. Agus Sholeh mengemukakan:

Pertumbuhan lembaga-lembaga pendidikan Islam tergantung kepada keluarga penguasa, terutama khalifah, yang menjadi pendorong utama bagi kegiatan keilmuan di Granada, Seville, dan Cordova. Fikih merupakan inti kurikulum, namun mereka lebih menekankan pada madzhab Maliki daripada madzhab-madzhab lainnya. Hal ini juga berlaku pada saat menentukan tenaga pengajar dan kurikulum yang akan diterapkannya, peran khalifah dan penasehat-penasehat dekatnya amat dominan. Karena khalifah dan keluarganya amat menentukan dalam penyediaan dan arah kegiatan-kegiatan lembaga-lembaga pendidikan di Andalusia, maka maju mundurnya lembaga-lembaga tersebut amat bergantung kepada *interest patronase* penguasa terhadap kegiatan keilmuan Islam.³⁹

Salah satu petunjuk penting peran dominan penguasa, nampak dalam pembangunan sebuah madrasah pada pertengahan abad ke-14 M. Pada tahun 750 H (1349 M), penguasa Nashrid yang bernama Yusuf Abu al-Hajjaj mendirikan madrasah cukup besar di Granada.

³⁸Lihat tulisan Rahmawaty Rahim, "Metode, Sistem, dan Materi Pendidikan Dasar (*Kuttab*) bagi Anak-Anak pada Masa Awal Daulah Abbasiyah (132 H/750 M-243 H/847 M)"; Lailiyah Muhtifah, "Konsep Dasar Pendidikan Multikultural di Institusi Pendidikan Islam Zaman Al-Makmun (813-833 M)"; Deden Maqbulah, "Kehidupan Murid dan Mahasiswa pada Masa Al-Makmun (198-218 H/813-833 M)"; Usman, "Institusi Pendidikan Islam Pada Masa Harun Al-Rasyid"; Nasim, "Madrasah dan Pertumbuhan Ilmu-Ilmu Islam", dalam ed. Suwito dan Fauzan, *Sejarah Sosial*.

³⁹Agus Sholeh, "Kontribusi Islam dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Spanyol pada Abad ke-VII-X M", dalam *Ibid.*, hlm. 116-117.

Pendirian madrasah ini mengilhami pendirian madrasah-madrasah lain di berbagai kota yang secara administratif menjadi bagian dari Andalusia.⁴⁰

Peneguhan peran dominan penguasa muslim Andalusia dalam perkembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam, tentu saja, menarik dicermati. Dengan peneguhan tersebut, sama halnya dengan menegasikan kesejarahan pendidikan Islam yang muncul dan berkembang atas inisiatif masyarakat. Kutipan Abed Jabiri dari pernyataan sejarawan Andalusia menguraikan:

Di kota Cordova para ulama dan penulis buku saling berkompetisi dengan para penulis istana. Posisinya dibandingkan dengan Andalusia adalah bagai kepala dengan jasadnya. Ia merupakan batu fondasi bagi Negeri Andalusia dan merupakan kota induk bagi kota-kota di sana. Ia tidak pernah sepi dari tokoh-tokoh ulama, para pembesar, dan kalangan cendekiawan dengan saintis.⁴¹

Kutipan Jabiri di atas memberikan petunjuk penting bahwa, terdapat dua kutub ulama atau intelektual muslim yang berada dalam posisi saling berkompetisi. Kutub pertama diwakili oleh intelektual yang menjadi bagian atau setidaknya dekat dengan politik dan kekuasaan di Andalusia. Sementara kutub kedua direpresentasikan oleh intelektual independen dan cenderung menarik diri dari kekuasaan. Masing-masing dari mereka, tentu saja, membutuhkan saluran publik untuk mentransmisikan kreasi intelektualnya. Dan institusi-institusi pendidikan menjadi saluran paling efektif untuk membangun penerimaan publik Islam atas karya-karya yang telah dihasilkan. Kutub yang pertama akan dengan mudah mentransmisikan kreasinya, karena kedekatannya dengan penguasa. Pertanyaannya sekarang, melalui institusi pendidikan Islam apa, kutub kedua membangun penerimaan publik Islam atas karya-karyanya? Sayangnya, jawaban atas pertanyaan ini masih menjadi bidang kajian yang belum tersentuh, dan mungkin saja, "didiamkan" oleh sejarah pendidikan Islam yang lekat dengan sejarah penguasa.

⁴⁰Sholeh, "Kontribusi", hlm. 117.

⁴¹Muhammad Abed al-Jabiri, *Post Tradisionalisme Islam*, terj. Ahmad Baso (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 102.

Penutup

Pemihakan berlebihan terhadap institusi Nizhamiyah, "pendiaman" terhadap historiografi pendidikan Islam sebelum era Abbasiyah, dan pengakuan sepenuhnya peran penguasa terhadap perkembangan kelembagaan pendidikan Islam di Andalusia hanyalah sebagian kecil yang dapat dijadikan sebagai petunjuk sementara, betapa pendekatan sejarah politik atau sejarah penguasa masih dominan dalam kajian SPI di tanah air.

Oleh karena itu, menjadi kebutuhan bersama di masa mendatang untuk menempatkan SPI sebagai bidang kajian yang benar-benar merepresentasikan dirinya sebagai bagian dari sejarah sosial, dan bukan sejarah penguasa. Sebuah bangunan keilmuan SPI yang menempatkan historiografi pendidikan Islam sebagai *total history* yang mengafirmasi sejarah pendidikan *mainstream* dan sekaligus *non mainstream*, sehingga tidak lagi adalah pendidikan Islam tanpa sejarah (*Islamic education without history*). *Wa Allâh a'lam bi al-Shawâb.**

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik. "Masalah Kontemporer Ilmu Sejarah dan Historiografi", *Historia: Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. II, No. 10 (Desember 2011).
- Assegaf, Abd. Rachman. *Politik Pendidikan Nasional, Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Pra-proklamasi ke Reformasi*. Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005.
- Azra, Azyumardi. "Hijaz; Antara Sejarah Politik dan Sejarah Sosial" Badri Yatim, *Sejarah Sosial Keagamaan Tanah Suci, Hijaz (Makkah dan Madinah), 1800-1925*. Jakarta: Logos: Wacana Ilmu, 1999.
- Azra, Azyumardi. *Historiografi Islam Kontemporer, Wacana, Aktualitas, dan Aktor Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII, Akar Pembaharuan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

- Azra, Azyumardi. "Konsep Kesejarahan Kuntowijoyo, Pentingnya Imajinasi, Emosi, Instuisi, dan Estetika Bahasa yang Khas dalam Penulisan Sejarah", *Ibda'*, Vol. 3, No. 2 (Juli-Desember 2005).
- Burke, Peter. "The Annales Paradigm", dalam *Encyclopedia of European Social History*, ed. Peter N. Stearns et. al. New York: The Gale Group, 2001.
- Burke, Peter. *History and Social Theory*. Ithaca: Cornell University Press, 1992.
- Burke, Peter. *The French Historical Revolution, The Annales School, 1929-89*. Cambridge: Polity Press, 1990.
- Carron, Gabriel and Roy A. Carr-Hill. *Non-Formal Education: Information and Planning Issues*. Paris: UNESCO-International Institute of Educational Planning, 1991.
- Depdikbud. *Pendidikan di Indonesia Jaman Penjajahan*. Jakarta: Depdikbud, 1993.
- Depdikbud. *Pendidikan di Indonesia, 1900-1974*. Jakarta: Depdikbud-Balai Pustaka, 1975.
- Eley, Geoff. "The Generations of Social History", dalam *Encyclopedia of European Social History*, ed. Peter N. Stearns et. al. New York: The Gale Group, 2001.
- Evans, David R. *The Planning of Non-Formal Education*. Paris: UNESCO International Institute of Educational Planning, 1981.
- Hasan, Noorheidi. "Faith And Politics: The Rise of The Laskar Jihad In The Era of Transition In Indonesia", *Indonesia*, Vol. 73 (April 2002).
- Hasan, Noorheidi. "Salafi Madrasas and Islamic Radicalism in Post-New Order Indonesia", dalam *Islamic Studies and Islamic Education in Contemporary South Asia*, Kamaruzzaman Bustaman-Ahmad, ed. Kuala Lumpur: Yayasan Ilmuwan, 2011.
- Hasan, Noorheidi. "The Salafi Madrasas of Indonesia", dalam *The Madrasa in Asia, Political Activism and Transnational Linkages*, Farish A. Noor, Yoginder Sikand and Martin van Bruinessen, ed. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008.

- Hasan, Noorheidi. *Laskar Jihad: Islam, Militancy and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia*. PhD Dissertation: Utrecht University, 2005.
- Hasbullah. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Heryanto, Ariel. et.al. *Bahasa dan Kekuasaan, Politik di Panggung Orde Baru*. Bandung: Mizan Press, 1996.
- Hoppers, Wim. *Non Formal Education and Basic Education Reform: A Conceptual Review*. Paris: UNESCO International Institute of Educational Planning, 2006.
- Jabiri, Muhammad Abed. *Post Tradisionalisme Islam*, terj. Ahmad Baso. Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang, 2005.
- Kurniawan, Asep. "Kebangkitan Madrasah, Telaah Historis Madrasah Nizhamiyah", *Jurnal Al-Tarbiyah, Edisi XX, Vol. 1 (Juni 2007)*, 18.
- MacCall, Daniel. "Introduction" dalam *Writing African History*, ed. John Edward Philips. Suffolk: University of Rochester Press, 2005.
- MacRaid, Donald M. dan Avram Taylor. *Social Theory and Social History*. New York: Palgrave MacMillan, 2004.
- Nasution, S. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Bandung: Penerbit Jemmars, 1983.
- Suminto, Aqib. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES, 1996.
- Suryo, Djoko. "Sejarah Sosial Intelektual Islam: Sebuah Pengantar", dalam Nor Huda, *Islam Nusantara, Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.
- Suwito dan Fauzan, ed. *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Tilaar, H.A.R. *Lima Puluh Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional, 1945-1995*. Jakarta: PT Gramedia, 1995.

- UNESCO, *International Standard Classification of Education*. Paris: UNESCO: International Institute of Educational Planning, 1997.
- UNESCO, *NFE-MIS Handbook: Developing A Sub-National Non-Formal Educational Management Information System*. Paris: UNESCO: International Institute of Educational Planning, 2005.
- Wood, Michael. *Official History in Modern Indonesia, New Order Perceptions and Counterinterview*. Leiden: Brill Academic Publisher, 2005.
- Yatim, Badri. *Sejarah Sosial Keagamaan Tanah Suci, Hijaz (Makkah dan Madinah), 1800-1925*. Jakarta: Logos: Wacana Ilmu, 1999.
- Zuhairini, et.al. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.